

ABSTRAK

Kamariatul Dinah, 2023. Implementasi Hak Wali Mujbir Dalam Pernikahan di Desa Pasar Panas Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H.

Kata Kunci: Implementasi, Hak Wali Mujbir, Pernikahan.

Hak wali mujbir merupakan bentuk kasih sayang seorang wali kepada anak perempuan yang berada dibawah perwaliannya. Implementasi hak wali mujbir dalam pernikahan yang terjadi di masyarakat berbeda-beda, termasuk masyarakat Desa Pasar Panas yang memiliki alasan tersendiri dalam menerapkan hak wali mujbir tersebut. Adapun hal ini dilakukan untuk memberikan kemaslahatan bagi anak perempuan mereka dengan memperhatikan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam hukum syara'.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi hak wali mujbir dalam pernikahan di Desa Pasar Panas Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong dan juga tinjauan hukum terhadap hak wali mujbir yang diterapkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Sehingga untuk memperoleh data di Desa Pasar Panas Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, dilakukan penelitian kepada 7 orang informan yang terdiri dari 3 orang tua yang menerapkan hak wali mujbir, 3 orang anak dari orang tua yang menerapkan hak wali mujbir, dan 1 orang kepala KUA untuk memberikan pendapatnya terhadap hak wali mujbir.

Hasil penelitian yang didapat dari informan yaitu bahwa yang melatar belakangi penerapan hak wali mujbir itu ialah masalah ekonomi dan malu karena anak perempuannya terlambat menikah. Hal ini menjadi sebuah budaya dalam masyarakat tentang keterlambatan menikah dianggap menjadi sebuah aib bagi keluarga, untuk itu sebagai solusinya maka orang tua mencarikan pasangan untuk anaknya agar secepatnya menikah tanpa mempertimbangkan pendapat anak perempuannya tersebut. Berdasarkan penelitian tersebut hak wali mujbir yang diterapkan oleh masyarakat Desa Pasar Panas telah sejalan dengan hukum islam, namun tetap harus memperhatikan syarat-syarat implementasi hak wali mujbir agar tidak menghilangkan masalah di dalamnya.